

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Dievaluasi Tiap 3 Bulan, Pj Gubernur DKI Bisa Diganti

DPRD DKI Jakarta menyodorkan tiga kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri, Kamis (14/9/2022) lalu. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Gabungan atau Rapinggab DPRD DKI Jakarta yang diikuti sembilan fraksi, sehari sebelumnya.

Ketiga nama tersebut adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta pun mengusulkan nama mereka dalam Rapinggab.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang kepada DPRD untuk ikut mengajukan tiga kandidat Pj Gubernur. Meski demikian, Khoirudin kembali meminta agar DPRD diberi ruang untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubernur DKI, karena dewan merupakan representasi masyarakat di Parlemen Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.

Berikut wawancara Manajer Online Warta Kota Dr Supripto dengan Khoirudin yang juga merupakan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, belum lama ini:

Seperti apa figur yang tepat untuk dipilih sebagai Pj Gubernur versi Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta?

Memang kami apresiasi Pak Presiden Joko Widodo—Redl melalui Mendagri yang memberikan ruang kepada warga Jakarta melalui wakil rakyat di DPRD untuk mengajukan nama. Walaupun

pada akhirnya menjadi kewenangan presiden, tapi paling tidak ini penghargaan yang luar biasa. Saya mengapresiasi hal itu.

Soal kriteria, tentu kami punya gambaran siapa yang bisa menjadi Pj Jakarta menggantikan Pak Anies Baswedan. Baik dia memang pernah di Jakarta, sedang menjabat di Jakarta atau orang yang ada di pemerintahan pusat yang memahami pemerintahan daerah. Kalau Pj itu kan sebetulnya pejabat karier yang harus eselon I dan banyak eselon I tersebar di kementerian. Tetapi kan tidak semua pegawai di kementerian memahami tata kelola pemerintahan daerah.

Memang yang paling paham dari Kemendagri. Bisa jadi, orang yang pernah eselon I di Jakarta, atau orang yang sedang eselon I di Jakarta, karena dia adalah orang yang telah mendalami betul tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Dari kriteria-kriteria tadi, kami Fraksi PKS melihat nama-nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sudah pas. Pertama adalah Dr Bahtiar, kedua Heru Budi Hartono, dan ketiga Marullah Matali.

Pak Heru pernah tugas di Jakarta. Kemudian Pak Marullah Matali Sekda saat ini sehingga memahami tata kelola pemerintahan Jakarta. Pun demikian dengan Pak Bahtiar. Seluruh pemerintahan daerah, dia yang menjadi bidannya untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan daerah sehingga secara umum ketiganya berpeluang dan memenuhi syarat.

Jika dilihat dari ketiga nama tersebut, siapa yang paling berbobot untuk menjadi Pj Gubernur?

Semuanya plus dan minus. Secara umum ketiganya mumpunilah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Sejauh ini kami sudah berkomunikasi dengan dua orang yaitu Pak Bahtiar dan Pak Marullah karena sudah biasa kami ngobrol apalagi beliau (Marullah—red) kan Sekda. Sedangkan Pak Heru belum, jadi kami lihat dari rekam jejaknya saja.

Adakah kriteria yang lebih konkret bagi

seorang Pj Gubernur pengganti Anies?

Kalau kerja teknokrasi sih banyak peran-peran SKPD sebagai pembantu gubernur, sehingga tidak terlalu berat. Tapi mungkin itu yang agak berat kemampuan manajerial, dan memahami aturan pemerintah daerah. Karena kita akan menghadapi tahun politik 2024 ya, makanya orang yang menjadi Pj Gubernur harus yang pas untuk menjaga stabilitas Jakarta.

Untuk figur Pj Gubernur DKI Jakarta terpilih, apakah yang bersangkutan bertugas sampai 2024 tanpa dievaluasi?

Kalau aturannya dievaluasi setiap tiga bulan artinya dia bisa diganti oleh pemberi mandat ketika dievaluasinya hasilnya negatif, jadi tidak menunggu setahun. Tapi kalau bagus, akan diperpanjang sampai Pilkada kembali.

Hal itu kami ketahui saat Rapinggab yang disampaikan bahwa Pj Gubernur akan dievaluasi setiap tiga bulan. Permintaan kami kepada pemerintah pusat agar dewan bisa ikut mengevaluasi secara terbuka, dan kami sampaikan kepada Kemendagri, dan itu sangat bahagia sekali jika ada ruang itu buat kami.

Secara umum, seperti apa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memotret pemerintahan Anies-Ahmad Riza Patria?

Penilaian ini bukan karena Pak Anies diusung oleh PKS tapi kami melihat secara objektif. Pertama, pengakuan nasional dan internasional terlihat dari penghargaan yang beliau terima yaitu tata kelola keuangan yang sudah lima kali mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualan) dari BPK RI. Ini prestasi yang luar biasa, buat Gubernur Jakarta yang mengelola anggaran lebih dari Rp 80 triliun setiap tahun.

Kemudian Anies juga mengendalikan 60.000 ASN dan 120.000 karyawan kontrak pemda. Itu kan nggak mudah dan beliau lima kali mendapat WTP jadi itu luar biasa. Kalau Ketua Fraksi PKS (Achmad Yani) sampaikan bahwa beliau gubernur pembawa perubahan, kalau saya menganggap Pak Anies nilainya sempurna. (faf/eko-bersambung)